



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

LIDYA TIARA BATUBARA
NIM : 11721202866

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2 Ditinjau Menurut Hukum Islam"*, yang ditulis oleh :

Nama : Lidya Tiara Batubara
 NIM : 11721202866
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-syakhsyyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 1442 H
1 April 2021 M

Pembimbing Skripsi


 Yuni Hartina, M.Sy

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2”**, yang ditulis oleh:

Nama : **LIDYA TIARA BATUBARA**
 NIM : **11721202866**
 Program Studi : **S1 Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 22 April 2021**
 Waktu : **08.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

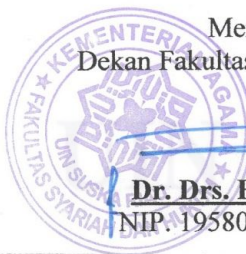
Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy.

Penguji I
Haswir, M.Ag.

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Lidya Tiara Batubara, (2021): Analisis Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya KHI Pasal 83 ayat 2 mengenai kewajiban isteri yang bunyinya “Isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Artinya peran domestic ini adalah menjadi suatu kewajiban yang harus diselenggarakan seperti, membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan siap santap untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari pencurian, mengurus anak, dan sebagainya. Pasal ini menuai banyak polemik, khususnya di kalangan para kaum feminim, yang mana pasal ini telah membatasi ruang gerak seorang wanita ingin berkarir atau terjun ke dunia pekerjaan, maka wanita harus melakukan peran ganda yang sangat memberatkan padahal dalam hukum Islam isteri tidak wajib mengerjakannya. Untuk itu, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kewajiban isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2 dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum islam normative atau sering disebut dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normative* dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan, diolah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan KHI Pasal 83 ayat 2, kemudian data diperoleh dan dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan persoalan ini.

Kesimpulan dari skripsi adalah pada prinsipnya, para imam mazhab yang empat (Abu Hanafiah, Maliki, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, karena hakikat dari akad nikah adalah untuk saling bersenang-senang (*istimta’*), bukan untuk pelayanan (*istikhdam*) serta di ambil manfaatnya. Dan ulama-ulama lain juga mengatakan hadist-hadist yang menceritakan khidmat seorang isteri terhadap suaminya itu merupakan perbuatan suka rela dan akhlak mulia.

Kata kunci : Hak dan kewajiban, KHI



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Syayidul Mustofa* baginda kita Rasulullah Muhammad saw. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di Yaumul Akhir nanti, Aamiin.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kaum muslimin pada umumnya, terutama pada diri penulis sendiri. Semoga dengan tersusunnya skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2 ”** ini, tidak hanya menambah khazanah keilmuan, namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan hendaknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Jika terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah SWT tetapi, jika di dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka datangnya dari diri penulis sendiri. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dimasa yang akan datang.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat jasa-jasa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh *ta'dhim*, dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahanda tercinta (Muhammad Taher Batubara dan Sugito) Mama tersayang (Sri Wati) yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do'a dan motivasinya, agar kami selalu menjadi orang yang sukses, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia dan Akhirat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) dan Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA, selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Yuni Harlina, M.Sy, selaku Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Adik-adikku tersayang (Bimal Ithaf Isnai Batubara, Lutfhi Adria Salsabilla Batubara) *Syukran* atas saran, do'a dan motivasinya.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN SUSKA Riau angkatan 2017, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
11. Teman-temanku Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2017 dan terkhusus Kelas Hukum Keluarga B my best friend forever yaitu: Siti Huraini (Sihurkyu) Yunia (Lomlomku) Dayu (Mahday), Gustiani (bebgus), MelaniPutri (ayang) Tina, Azizah, Marteen (si opung) dkk para senior dan junior yang telah memberikan bantuan dan arahan dan juga doa dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teman-temanku sekaligus Sahabatku di Ponpes Arkanuddin dan PMDU Asahan-Kisaran yaitu, Iyem (Alm. Sisa Lestari), NoviArdianti (si Nduk), LeniSahara (si Mang-ku), Azizah, Nida, Ira, Puspa, Imasun, Mahyuni, mbak Aci, Sukma, dan Nova, Awaluddin, Fery, Fiqih dan Muhammad Taufik Al Dhani. Terima kasih atas kebersamaan kita yang indah, *semoga persaudaraan kita tidak terputus selamanya!*

13. Sahabat-sahabat penulis, keluarga di Pekanbaru IKAMDU dan orang-orang terdekat penulis yang selalu setiap saat memberikan motivasi dan support serta doa yang terbaik untuk penulis, Abanganda Yusuf Sabilly S.H,M.H, ukhti Putri Ramadhani S.Pd, ukhti Rizka Sumantra S.E, dan terkhusus Kost Petak Dua Warna Kuning gang Sepakat Belakang Mesjid Al Faidzin, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu sebab halamannya gak cukup hehehe terimakasih banyak ketawak ketawa selama penyelesaian Skripsi ini, semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kririk dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sangat kami harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah ini. Semoga karya Ilmiah ini yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri., *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, Maret 2021
Penulis

LIDYA TIARA BATUBARA
NIM : 11721202866

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	11
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM	14
A. Sekilas Tentang Hukum Islam	14
1. Periode awal sampai tahun 1945	15
2. Periode tahun 1945 sampai tahun 1985	18
3. Periode 1985 sampai sekarang	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN.....	33
A. Pengertian Nikah	33
B. Dasar Hukum Nikah	35
C. Hukum Menikah	43
D. Syarat dan Rukun Nikah	46
E. Tujuan dan Manfaat Pernikahan	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Kewajiban Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 ayat 2	61
1. Tanggung Jawab Suami Isteri	64
2. Implikasi Hukum Isteri yang Melalaikan Kewajiban	75
B. Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 ayat 2	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung beban kerja lebih lama dan tidak dihargai, yaitu sebagai *domestic worker*. Pekerjaan rumah tangga yang tidak mengenal titik (tidak ada hentinya) dianggap sudah merupakan kewajiban isteri. Hal ini disosialisasikan secara turun menurun oleh adat, hingga perempuan sendiri merasa sebagai kebenaran dan menikmatinya meskipun tidak memperoleh penghargaan. Sebaliknya suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang tidak pantas melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak, mengasuh anak dan lain-lain yang sangat menyita waktu.

Beban tersebut tentu bertambah berat jika isteri juga bekerja mencari nafkah. Sedangkan suami karena diposisikan sebagai kepala rumah keluarga, untuk keperluannya saja harus dilayani isteri. Hal tersebut dibenarkan oleh adat, yang berakibat membutakan mata hati suami, tidak dapat membedakan apakah benar ia mencintai isterinya atau mengeksploitasinya sepanjang waktu. Sering kita jumpai isteri yang tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, sehingga ia tidak bisa mengikuti perkembangan yang dicapai oleh suaminya.¹

Seorang wanita dinikahi bukanlah sebagai tukang masak dan mencuci. Jika seorang wanita pandai memasak, maka hal tersebut merupakan suatu

¹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Cet.1, h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelebihan bukan kewajiban. Isteri merupakan seorang ratu di dalam rumah. Dan seorang ratu sudah sepatutnya memiliki pembantu, dan merupakan kewajiban seorang suami untuk menyediakan pembantu untuk isterinya. Seorang isteri pada hakikatnya tidak berkewajiban melakukan aktivitas domestik yang melelahkan, seperti mencuci, menyapu, memasak, dan pekerjaan yang sejenisnya.²

Dalam format berfikir bangsa kita, posisi seorang isteri memang lebih merupakan abdi atau pembantu buat suami. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Islam telah mewajibkan para isteri untuk melakukan banyak pekerjaan rumah tangga, layaknya seorang pembantu. Isteri harus menyapu, mengepel, menyetrika, memasak, dan semua pekerjaan rumah tangga lainnya. Waktunya akan banyak tersita dengan pekerjaan sebanyak itu. Bahkan waktu suaminya pulang, isteri sudah lelah dengan pekerjaan rumah tangga hariannya. Tidak ada waktu untuk melayani suami dan anak-anaknya.³

Fiqih semua mazhab sama sekali tidak memberi beban kepada isteri, baik beban pekerjaan domestik, reproduksi non kodrati, seperti merawat anak, dari memandikan, menyuapi, mengasuh anak, bahkan menurut imam Malik, menyusui juga merupakan tanggung jawab suami, apalagi beban ekonomi, adalah merupakan tanggung jawab penuh suami. Fiqih juga mengharuskan

² Jamil Azzaini, *A Tribute To Others Empowering Leadership*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), Cet. 2, h. 80

³ Ahmad Sarwat, *Isteri Bukan Pembantu*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Cet. 1, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami bersikap baik secara psikologis kepada isteri. Tugas isteri menurut fiqih adalah taat kepada suami.⁴

Terkait dengan perihal rumah tangga (urusan rumah tangga), sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya.

Karena, akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Adapun pekerjaan rumah termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam kehidupan rumah tangga. Pendapat ini dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Zahiriyah.⁵ Dalam kitab-kitab fikih klasik sudah dijelaskan secara rinci oleh para ulama mengenai perkara yang sebenarnya bukan termasuk kewajiban isteri terhadap suaminya. Contohnya perkara yang berkaitan dengan urusan domestik.⁶

Pada prinsipnya, para imam mazhab yang empat (Abu Hanafah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan domestik, karena hakikat dari akad nikah adalah untuk saling bersenang-senang (*istimta'*), bukan untuk pelayanan

⁴ Tutik Hamidah, *loc.cit*

⁵ Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 294.

⁶ Ali Muhanif, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(*istikhdam*) serta di ambil manfaatnya.⁷ Para ulama ahli zhahir berpendapat, sesungguhnya akad nikah itu menuntut kesenangan bukan untuk memberikan pelayanan, memberikan manfaat-manfaat. Mereka mengatakan bahwa hadits-hadits yang menceritakan khidmat seorang isteri terhadap suaminya itu merupakan perbuatan sukarela dan akhlak mulia.⁸

Maka *jumhur* ulama berpendapat bahwasanya semua pekerjaan itu bukanlah kewajiban seorang isteri, melainkan kewajiban suami itu sendiri. Hanya saja memang alangkah baiknya sang isteri mau membantu sang suami dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* juz 19:

فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها⁹

Artinya: “*Jumhur* ulama (*Syafi'iyah* dan *Hanabilah* dan sebagian *Malikiyah*) berpendapat bahwasanya isteri tidak wajib melayani suaminya.

Dalam kitab fiqh kontemporer, yaitu *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Syeikh Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan peran isteri dalam masalah urusan rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa itu semua bukanlah kewajiban sang isteri, melainkan kewajiban sang suami.

⁷ *Ibid*

⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 2, h. 170

⁹ Wijaratul al-Auqat wa asy-Sya'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Thaba'ah Dzati as-Salaasil, 1990), Cet. 2, Juz. 19, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

اما واجب الزوجة: فلا يجب عليها خدمة زوجها في الخبز والطحن والطبخ والغسل وغيرها من الخدمات، وعليه أن يأتيها بطعام مهياً إن كانت ممن لا تخدم نفسها، لأن المعقود عليه من جهتها هو الأستمتاع فلا يلزمها ما سواه.¹⁰

Artinya : Adapun kewajiban seorang isteri adalah: dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci, mencuci serta jenis pelayanan yang lainnya. Si suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri adalah orang yang tidak biasa melayani dirinya sendiri, karena objek yang diakadkan dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya (istimta'), maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya".

Masalah kewajiban seorang suami mempergauli isterinya dengan cara yang baik, maka Allah SWT. berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.¹¹ kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa’[4]: 19)

Di Indonesia dapat kita lihat, jika ada seorang suami mengerjakan pekerjaan rumah tangga, maka ini akan terlihat sangat aneh, bahkan ada istilah ‘suami takut isteri’. Masyarakat Indonesia umumnya di perdesaan mereka memahami bahwa peran suami untuk memasak, mencuci, menyapu, itu semua lumrah dilakukan ketika isteri sakit atau pasca melahirkan, karena sang isteri

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, Jil. 7, h.334

¹¹ Maksud dari “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada isteri yang dicintainya atau tidak. Kata (معروف) mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yaitu berbuat ihsan dan berbuat yang baik-baik kepada isrti. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Jil.2, h. 382

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak mungkin melakukan itu semua seperti biasanya. Maka ini sangat aneh, karena sesungguhnya ketika suami melakukan peran domestik, maka ia sedang melakukan kewajibannya. Karena menurut fiqh, itu semua bukanlah kewajiban seorang isteri. Terlebih lagi di Indonesia, UU mengatur bahwa memang ranah domestik itu menjadi kewajiban isteri.

Di Indonesia, perihal hukum perdata menyangkut perkawinan sudah diatur oleh UU tersendiri, dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban suami isteri. Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang telah termuat dalam KHI adalah dimulai dari pasal 77- 84 (Bab Hak dan Kewajiban Suami Isteri).

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami isteri terdapat dalam pasal 79, yaitu:

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga.¹²

¹² Penegasan peran pada ayat (1) di atas dinilai oleh sebahagian kelompok tertentu, khususnya para kaum feminis atau para aktivis pemberdayaan perempuan sebagai pembakuan struktur patriarkhi dengan adanya pengukuhan peran keibuan sebagai nilai resmi yang mengatur peran perempuan dalam keluarga.

Menurut T.O Ihromi, penekanan kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga, berarti kegiatannya di ranah domestik, sedangkan suami sebagai pencari nafkah yang kegiatannya di ranah publik. Sangat jelas disini terdapat konstruksi sosial tentang tugas khas antara suami dan isteri. Dalam kenyataan dilapangan, isteri banyak yang bekerja diluar rumah, namun karena peran gendernya sebagai ibu rumah tangga, maka ia berperan ganda. Karena peran tersebut, maka setelah pulang bekerja, seorang isteri harus kembali bekerja menyelesaikan berbagai aktivitas domestik. Dibandingkan dengan seorang suami, setelah bekerja ia bisa langsung istirahat. Sangat jelas adanya ketimpangan.

Ketentuan tersebut bukan berarti bahwa semua tugas domestik dibebankan sepenuhnya dipunggung isteri dan suami tidak ikut membantu. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan suami membantu isteri sebagaimana isteri membantu suaminya bekerja mencari nafkah. Namun realitasnya, banyak suami yang menolak membantu isteri di dapur sebab dianggap bukan tugasnya, tetapi mereka tidak menolak jika isterinya ikut membantu mencangkul di sawah. Tidak boleh ada pembakuan bahwa peran domestik yang menjadi beban isteri dan peran di ruang publik yang menjadi hak suami. Lihat Asni, *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah KHI Perspektif Kesetaraan Gender)*, Jurnal Perempuan, h. 4

Siti Musdah Mulia juga mengatakan dalam wawancaranya dengan Ulil Absor Abdalla pada 28 Agustus 2003, saat ia menjabat sebagai staf ahli Menteri Agama bidang Organisasi dan Hukum, ia mengatakan bahwa dalam KHI produk fikih yang dimuat justru bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Jika ditinjau dari segi isi, menurut beliau KHI sangat konservatif. Ditinjau dari kalangan para feminis, khususnya aspek kesetaraan gender, banyak pasal yang tidak sejalan dengan aspirasi keadilan gender, seperti pasal kewajiban suami isteri, harta kekayaan, dan juga hak dalam perwalian. Dan ketika berbicara masalah kedudukan suami isteri pada pasal 79 yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal ini, banyak terjadi perdebatan tentang kedudukan seorang isteri sebagai ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga, yang mana pasal ini dinilai terlalu mengekang ruang lingkup gerak perempuan hanya dalam lingkungan domestik saja. Dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, kewajiban seorang isteri juga disebutkan dalam pasal selanjutnya.

Pasal 83 dan pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban isteri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³

Dalam pasal 83 KHI ayat 2 disebutkan bahwa kewajiban seorang isteri adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari

menyatakan suami sebagai kepala keluarga dan isteri seorang ibu rumah tangga, maka Musdah Mulia menilai bahwa pasal ini telah membakukan peran perempuan dalam aktivitas domestik. Ia juga mengatakan bahwa sudah selayaknya isi KHI yang dianggap bias gender diubah secara keseluruhan, karena tidak memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak-anak. Lihat Siti Musdah Mulia, *Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif*, dalam islamlib.com/kajian/fikih/siti-musdah-mulia-kompilasi-hukum-islam-sangat-konservatif/. Diakses pada 14 September 2020, Pukul 10.00 WIB.

¹³ Bunyi pasal ini juga sama dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, "Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dengan sebaik-baiknya. Artinya, peran¹⁴ domestik ini adalah menjadi suatu kewajiban yang harus diselenggarakan. Seperti membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari pencurian, mengurus pekerjaan anak, dan sebagainya.¹⁵

Pasal ini memang menuai banyak polemik, khususnya di kalangan para kaum feminim, yang mana pasal ini dinilai mendiskriminasi kaum wanita, karena pasal ini telah membatasi ruang gerak seorang wanita hanya dalam ranah domestik saja. Sehingga ketika seorang wanita ingin berkarir atau terjun ke dunia pekerjaan, maka wanita harus melakukan peran ganda yang sangat memberatkan. Setelah mereka lelah bekerja diluar, sesampainya dirumah mereka kembali lagi bekerja mengurus pekerjaan rumah tangganya.

¹⁴ Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat . Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka,2007) h.845

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan. Lihat Syaron Brigitte Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 048, h. 2

Dari penjelasan makna peran di atas, maka maksud peran isteri adalah suatu perilaku yang harus dilakukan atau ditunaikan oleh isteri dari kedudukan yang dimilikinya. Dalam hal ini kedudukannya adalah sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tugas menyelenggarakan keperluan dan pekerjaan rumah tangga.

¹⁵ Islamiyati, Jurnal, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika dibandingkan dengan yang telah penulis uraikan di atas, maka ada perbedaan yang tampak sangat jelas antara teori dan praktek di kalangan masyarakat. Realita yang terjadi dilapangan terlihat berbeda dengan fatwa para ulama yang telah disebutkan di atas. Begitu juga dengan pasal dalam KHI dan UU perkawinan, sangat tampak perbedaannya dengan hukum fiqih mengenai tugas seorang isteri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga.

Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Dan untuk menguraikannya secara rinci maka penulis kemas hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang penulis beri judul **“Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga dalam KHI Pasal 83 Ayat 2”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan spesifik, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup peran isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari batasan masalah di atas. Maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Mengapa KHI Pasal 83 Ayat 2 menetapkan isteri wajib menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimana Analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan Pekerjaan rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2? .

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kewajiban Isteri menyelenggarakan pekerjaan Rumah Tangga dalam KHI Pasal 83 ayat 2.
 - b. Untuk mengetahui analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan pekerjaan rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk dibangku perkuliahan.
 - b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum Islam.
 - c. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹⁶

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu bahan yang di ambil dari KHI.
- b. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, yang di ambil dari kitab-kitab fiqih seperti *Fiqh al-iIslam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, dan kitab lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dll.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan

¹⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1. h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*.

Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.¹⁷

5. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu uraian yang di ambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan di ambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

¹⁷ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9, h.167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Dalam bab ini akan diuraikan sejarah kompilasi hukum Islam, dasar kewajiban isteri dalam kompilasi hukum Islam.

BAB III : Merupakan tinjauan umum tentang pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum menikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan manfaat pernikahan.

BAB IV : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang kewajiban isteri menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga dan analisis terhadap peran isteri menyelenggarakan Pekerjaan rumah tangga dalam KHI pasal 83 ayat 2.

BAB V : Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

SEJARAH KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu di ambil dari kata *compile* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.¹⁸ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.¹⁹

Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang di ambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.²⁰

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat

¹⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 10

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.²¹

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.²²

Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran ke arah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

1. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan

²¹ *Ibid.* h. 6

²² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke- 2, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan hukum Islam di dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan pada sebuah peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar.²³

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam di akui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering Reglemen tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 Regeering Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan Bumiputra, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang yang menyelesaikan masalah itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Peradilan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah ditentukan yaitu Priesterraad (Peradilan Agama), sebagaimana tercantum dalam Staatsblaad 1882

²³ *Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 152 Pasal 1 dinyatakan: “Di samping setiap Lanandraad di Jawa dan Madura diadakan satu Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum Landraad”. Dulunya Pengadilan Agama disebut dengan nama Priesterraad yang artinya “Majlis Padri”. Nama ini sebenarnya keliru, sebab dalam agama Islam tidak ada Padri. Padri atau Paderi dimaknakan sebagai pendeta Khatolik atau pendeta Kristen atau peperangan yang terjadi di Sumatra Barat pada 1921-1927.

Pada mulanya Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama; pengadilan ini sendiri menetapkan perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkungan kekuasaannya, dan pada umumnya perkara ini berhubungan dengan pernikahan, yaitu perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia di antaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada waktu itu, Staatsblad 1882 No. 152 belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, pengadilan tersebut hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, di antaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.²⁴

2. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah Huwelligksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan Huwelligksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk

²⁴ *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.²⁵

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab fiqh mu'tabarah sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*.
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*.
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*.
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli*.
- e. *Tuhfah*.
- f. *Tarqib al-Musytaq*.
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah* (li 'Usman ibn Yahya)
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*.
- i. *Al-Qawanin al-syar'iyah* (li Sadaqah Dahlan).
- j. *Syamsuri li al-Faraid*.
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*.
- l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah*.
- m. *Mugni al- Muhtaj*.²⁶

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam ke arah hukum tertulis. Namun demikian, bagianbagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.²⁷

²⁵ *Ibid*, h. 5

²⁶ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), h. 85

²⁷ Amin Husein Nasution, *Op.cit*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *symposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.²⁸

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

3. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang

²⁸ *Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.²⁹

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.³⁰

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegianto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis, dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.³¹

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan

²⁹ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, h. 9

³⁰ Abdurrahman, *Op. cit*, h. 34

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaria Drs. Marfuddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama.

Di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
 1. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 2. Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 3. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
- b. Pelaksana Bidang Wawancara:
 1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 2. Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
 1. H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)³²

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas di tentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum.Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat

³² Ibid, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab.

- b. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

- c. Lokakarya.

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

- d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.³³

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, di antaranya:

- a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga

³³ *Ibid*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.³⁴

Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalah-masalah hukum yang telah diselesaikan.³⁵ Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1. IAIN Ar-Raniri Banda Aceh:
 - a. *Al Bajuri*
 - b. *Fathul Mu'in*
 - c. *Syarqawi 'ala al-Tahrier*
 - d. *Mughni Muhtaj.*
 - e. *Nihayah Al Muhtaj.*
 - f. *Asy Syarqawi.*
2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:
 - a. *I'arah al-Thalibien.*
 - b. *Tuhfa.*
 - c. *Tarqhib al-Musytaq.*
 - d. *Bulghat al-Salik.*
 - e. *Syamsuri fil Faraidl.*
 - f. *Al-Mudawwanah.*
3. IAIN Antasari Banjarmasin:
 - a. *Qalyubi/Mahalli*
 - b. *Fath al-Wahab.*
 - c. *Bidayah al-Mujtahid.*

³⁴Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 59

³⁵ Abdurrahman, *Op.cit*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Al-Umm*.
- e. *Bughyatul Mustarsyidien*.
- f. *Aqidah wa Syari'ah*
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
 - a. *Al-Muhalla*.
 - b. *Al-Wajiz*.
 - c. *Fath al-Qadier*.
 - d. *A-lfiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*.
 - e. *Fiqh al-Sunnah*.
5. IAIN Sunan Ampel Surabaya:
 - a. *Kasyaf al-Qina*.
 - b. *Majmu'atu Fatawi*.
 - c. *Qawanin Syal'ah lis Sayid Usman bin Yahya*.
 - d. *Al-Mughni*.
 - e. *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi*.
6. IAIN Alauddin Ujung Pandang:
 - a. *Qawanin Syari'iyah Sayid Sudaqah Dahlan*.
 - b. *Nawab al-Jalil*.
 - c. *Syarh Ibn 'Abidin*.
 - d. *Al-Muwattha'*.
 - e. *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki*.
7. IAIN Imam Bonjol Padang:
 - a. *Bada'i al-Sanai*.
 - b. *Tabyin al-Haqaiq*.
 - c. *Al-fatawa al-Hindiyah*.
 - d. *Fath al-Qadir*.
 - e. *Nihayah*.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibn Taimiyah.³⁶

³⁶ *Ibid*, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.³⁷ Wawancara ini di ambil dari 10 wilayah, di antaranya:

- 1) Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- 2) Medan, sebanyak 19 ulama.
- 3) Palembang, sebanyak 20 ulama.
- 4) Padang, sebanyak 20 ulama.
- 5) Bandung, sebanyak 16 ulama.
- 6) Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- 7) Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- 8) Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- 9) Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- 10) Mataram, sebanyak 20 ulama.³⁸

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.³⁹

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama

³⁷ Busthanul Arifin, *Op.cit*, h. 59

³⁸ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, h. 19

³⁹ Abdurrahman, *Op. cit*, h. 38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- a) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
 - b) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
 - c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
 - d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.⁴⁰
- d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.⁴¹

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam

⁴⁰ *Ibid*, h. 43

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh di antaranya:

- a). System Peradilan.
- b). Masuknya Syariah *Law* dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- c). Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapan hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan muslim.⁴²
- e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988.

Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.⁴³

Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi. Di antaranya:

- (1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH.

⁴² *Ibid*

⁴³ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.

- (2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.
- (3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Perumusan materi dilakukan di Komisi dan masing-masing Komisi dan untuk itu dibentuk Tim Perumusannya, yaitu:

1) Tim Perumus Komisi A tentang Hukum Perkawinan:

- a) H.M. Yahya Harahap, SH.
- b) Drs. Marfuiddin Kosasih, SH.
- c) KH. Halim Muhammad, SH.
- d) H. Muchtar Zarkasyi, SH.
- e) KH. Ali Yafie.
- f) KH. Najih Ahyad.

2) Tim Perumus Komisi B tentang Hukum Kewarisan.

- a) H.A. Wasit Aulawi, MA.
- b) H. Zainal Abidin Abubakar. SH.
- c) KH. Azhar Basyir, MA.
- d) Prof. KH. Md. Kholid, SH.
- e) Drs. Ersyad, SH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tim Perumus Komisi C tentang Hukum Wakaf:

- a) H. Masrani Basran, SH.
- b) DR. H.A. Gani Abdullah, SH.
- c) Prof. DR. H. Rahmat Djanika.
- d) Prof. KH. Ibrahim Husein, LML.
- e) KH. Aziz Masyhuri.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.⁴⁴

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, h. 94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁵

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991

⁴⁵ *Ibid.* h. 95

yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ *Ibid*, h. 96

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Secara bahasa, nikah (نكاح) berarti berkumpul atau bersetubuh.⁴⁷ Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan⁴⁸ berasal dari kata “kawin” menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.⁴⁹ Nikah artinya akad menikahkan. Nikah secara hakikat adalah akad. Secara majaz dipakaikan dengan makna bersetubuh. Yang menjadi objek akad nikah adalah manfaat bersetubuh/bersenang-senang bukan memiliki perempuan.⁵⁰

Pengertian nikah dalam bahasa Indonesia digunakan istilah hukum perkawinan yang dimaksud dengan munakahat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga.⁵¹

⁴⁷ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), Cet. 17, h. 11

⁴⁸ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Lihat Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. 2, h. 7

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4, h. 7, lihat juga Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. 3, h. 456

⁵⁰ Musa bin Ahmad al-Hajawi, *Al-Iqna’ li al-Thalib al-Intifaq*, (Riyadh: Dar al-Malik Abdul Aziz, 2002), Cet. 3, Juz. 3, h. 295

⁵¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdhan*.⁵²

Secara istilah, sebagian *fuqaha'* memberikan defenisi perkawinan sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan dengan kelamin dengan lafadl nikah atau tazwij yang semakna keduanya”.⁵³

Sementara Syeikh Wahbah al-Zuhaili menuliskan defenisi pernikahan sebagai berikut:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُؤَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.⁵⁴

Artinya : “Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang laki-laki dengan perempuan”

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinikan:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ نَحْوِهِ.

Artinya : Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵⁵

Kata *az-zawaj* (pernikahan) secara bahasa berarti pasangan atau jodoh.⁵⁶ Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT.:

⁵² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 324.

⁵³ Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jil. II, h. 48.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. 2, Jil. 7, h. 29

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit*, h. 8

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khutbah, Nikah, dan Talak*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, h. 35

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كَذَٰلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِخُورٍ عَيْنٍ ﴿٥٤﴾

Artinya : *Demikianlah. dan kami kawinkan mereka dengan bidadari. (QS. Ad-Dukhan [44]: 54)*

Dalam ayat lain juga disebutkan lafaz yang sama, di antaranya:

وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ ﴿٧﴾

Artinya : *Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan. (QS. At-Takwir[81]: 7)*

Dari berbagai definisi yang sudah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera.⁵⁷

B. Dasar Hukum Nikah

1. Dalil-dalil al-Qur'an

Syariat pernikahan tentunya memiliki dasar yang menjadi acuan, dalam al-Qur'an sendiri akan banyak ditemukan dalil-dalilnya, di antaranya:

- a. Firman Allah dalam surah An-Nūr ayat [24] 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah*

⁵⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Op.cit*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur [24]:32).*⁵⁸

Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir al-Misbah, bahwa ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan para kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu, *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mmereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya.⁵⁹

Ia juga menjelaskan, bahwa kata (الأَيَامِي) merupakan jamak dari (أَيَم) pada mulanya bermakna *perempuan yang tidak memiliki pasangan*. Maknanya adalah janda, tetapi kemudian meluas sehingga masuk juga gadis-gadis, bahkan meluas sehingga mencakup juga pria yang hidup membujang, baik jejak maupun duda.⁶⁰

- b. Firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4]:3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa' [4]:3)*

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 352.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 9, h. 335

⁶⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, pada ayat (فَأَنكِحُوا) adalah perintah yang bersifat *al-Ibahah* (memperbolehkan). ia juga mengatakan bahwa ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perintah tersebut bersifat wajib, namun yang dimaksud wajib disini bukanlah wajib nikahnya, akan tetapi wajib terbatas pada jumlahnya, yaitu dua, tiga atau empat. Atau dengan kata lain, jika berpoligami, maka wajib hanya terbatas pada jumlah tersebut.⁶¹ Dalam ayat ini mengandung petunjuk diperbolehkannya melakukan poligami sampai batas maksimal empat, tidak boleh seseorang memiliki isteri lebih dari empat.⁶²

Imam al-Qurthubi mengatakan bahwa wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebahagian orang yang pemahamannya jauh dari al-Qur'an dan Sunnah dan bertentangan dengan pendapat ulama salaf. Mereka beranggapan bahwa “*waw*” pada kalimat tersebut adalah satu kesatuan. Hal tersebut berdasarkan bahwa Nabi SAW. menikahi sembilan wanita dan mengumpulkan mereka dibawah perlindungan beliau. Pendapat jahil ini sering dilontarkan oleh para pengikut *rafidhoh* dan ahlu zhahir (zhahiriyyah) dan mereka menjadikan kata *masna* seperti *itsnain*,

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, Jil. 2, h. 573

⁶² *Ibid*, h. 577

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian pula *tsulasa* dan *rubā'*. Bahkan sebagian ahli zhahir berpendapat lebih parah dari itu, yaitu bolehnya menikahi delapan sampai sepuluh isteri.⁶³

- c. Firman Allah dalam surah Ar-Ruum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum [30]: 21)*

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa manusia itu akan gelisah jika ia hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu laki-laki mencari perempuan sampai dapat dan perempuan menunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukan jadi satu. Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan terjadi perkembangbiakan manusia.⁶⁴ Teranglah disini bahwa hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu diantara ayat-ayat Allah SWT. atau satu diantara berbagai ragam kebesaran Allah SWT.⁶⁵

⁶³ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Rijal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, Jil. , h. 45

⁶⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 1, Jil. 7, h. 51

⁶⁵ *Ibid*

2. Dalil-dalil hadits

Selain ayat-ayat di atas, dalil-dali tentang syariat menikah akan banyak kita temui dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. di antaranya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ*. متفق عليه⁶⁶

Artinya : *Dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW. bersabda: “Nikahilah wanita karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, karena ia akan menyelamatkanmu.”* (Muttafaq ‘Alaihi)

Hadits ini merupakan anjuran seseorang laki-laki ketika akan melaksanakan pernikahan hendaklah ia mencari pasangan yang benar-benar baik, terutama dalam masalah agamanya. Karena Rasulullah SAW. memberikan beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan demi kebahagiaan pernikahan mereka nantinya.

Imam Ash-Shan’ani menjelaskan makna hadits ini, bahwa yang membuat laki-laki tertarik dengan wanita itu karena empat sifat yang dimiliki oleh wanita seperti yang disebutkan hadits di atas, dan sifat terakhir adalah karena agamanya. Rasulullah SAW. menyerukan agar ketika seseorang hendak menikah, lalu ia menemukan wanita yang baik agamanya, maka janganlah ia berpaling darinya.⁶⁷

⁶⁶ Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Abdul Hayyi, (Jakarta: Gema Insani, 2017), Jil. 2 h. 62

⁶⁷ Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam* (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), Cet. 2, h. 602

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ}. متفق عليه⁶⁸

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mempunyai kesanggupan menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi perisai baginya." (Muttafaq 'Alaihi)

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil keterangan dari para ulama Syafi'iyah dalam memaknai kata "*syabab*", yaitu nama yang digunakan untuk orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun.⁶⁹ Ia juga menukil pendapat imam al-Qurthubi dalam kitab al-Mufhim, yaitu seorang dikatakan "*hadats*" (remaja) itu hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut "*syabab*" (pemuda) hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut "*kahl*" (tua), hal ini juga senada dengan perkataan Az-Zamakhshari tentang "*syabab*" (pemuda), yaitu sejak baligh hingga usia 32 tahun.⁷⁰

Sedangkan menurut Ibnu Syas al-Maliki dalam kitab *al-Jawahir* bahwa usia seseorang dikatakan pemuda hingga umur 40 tahun. Namun Imam an-Nawai berkata "Pendapat paling benar dan terpilih ialah seorang dikatakan pemuda dari sejak baligh hingga mendekati usia 30 tahun, kemudian dia

⁶⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), Cet. 1, h. 222

⁶⁹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, (Daar al-Thoybah, 2005), Cet. 1, Jil. 11, h. 320

⁷⁰ *Ibid*, h. 321

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

disebut “*kahl*” (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan setelah itu disebut dengan “*syaikh*” (kakek).⁷¹

Menurut Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, Rasulullah SAW. berbicara kepada para *syabaab* dikarenakan merekalah yang lebih cenderung syahwatnya kepada wanita.⁷² Makna “*al-baa’ah*” disini ialah “*jima*”, maksudnya adalah barangsiapa diantara kalian yang mampu berjima’ dan mampu membiayai nikah, maka nikahlah.⁷³

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menukil keterangan dari pendapat imam an-Nawawi, bahwa arti “*al-baa’ah*” ada dua:

- a. Yang pertama yaitu *jima*’. Artinya, “Barang siapa diantara kamu yang mampu untuk melakukan senggama (*jima*’) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu melakukan *jima*’ karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaknya ia puasa untuk menolak syahwatnya.
- b. Yang kedua yaitu biaya nikah, maka makna hadits ini adalah “Barang siapa yang mampu menanggung biaya nikah, maka nikahlah. Dan bagi yang belum mampu maka hendaklah berpuasa untuk mencegah dorongan syahwatnya.”⁷⁴

⁷¹ *Ibid*

⁷² Pendapat Shafiyurrahman al-Mubarakfuri ini juga sama dengan pendapat imam Nawawi yang dinukil Ibnu Hajar dalam Fathul Baarii.

⁷³ Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Abu Abdurrahman, (Surabaya: Pustaka Elba, 2016), Cet. 1, h.

⁷⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Loc.cit*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama Malikiyah berdalil dengan hadits ini untuk mengharamkan *istimna'* (onani), karena disaat seseorang tidak mampu menikah, maka Rasulullah SAW. memberikan solusi yaitu berpuasa, agar ia dapat menekan gejala syahwatnya. Sementara itu, sekelompok ulama membolehkan *istimna'*, yaitu para ulama dari kalangan Hanbali dan Hanafi dengan tujuan mengurangi dorongan syahwat.⁷⁵ Imam Shan'ani juga berpendapat demikian ketika menjelaskan hadits ini, yaitu sebahagian mazhab Maliki menggunakan hadis ini sebagai dalil haramnya onani, karena jika dibolehkan tentu akan dijelaskan dan diterangkan, karena onani merupakan cara termudah bagi yang belum mampu menikah.⁷⁶

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ: {لَكِنِّي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي}. متفق عليه⁷⁷

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Rasulullah SAW. memuji dan menyanjung Allah SWT. lalu bersabda: "Tetapi aku juga shalat dan aku juga tidur, aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa membenci sunnahku berarti ia bukan termasuk golonganku." (Muttafaq 'Alaihi)

Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan makna فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي (Barang siapa membenci sunnahku berarti ia bukan termasuk golonganku)

dalam *Fathul Baarii*, yaitu maksud sunnah disini adalah jalan hidup beliau, bukan sunnah yang berhadapan dengan fardhu. Kata "*raghiba*" pada hadits ini

⁷⁵ Ibid, h. 327

⁷⁶ Imam Ash-Shan'ani, *Op.cit*, h. 601

⁷⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 222. Matan hadits hanya sebahagian saja, lengkapnya lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, (Daar al-Thoybah, 2005), Cet. 1, Jil. 11, h. 314

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

artinya berpaling dari sesuatu yang lain. Maksudnya, barangsiapa yang meninggalkan jalanku dan mengambil jalan selainku, maka dia bukan dariku.

Rasulullah SAW. hendak menyindir cara-cara *rahbaniyah* (kependetaan).⁷⁸

Itulah kenapa Rasulullah SAW. menganjurkan kita untuk menikah agar kita tidak sama dengan paham *rahbaniyah* (kependetaan) yang tidak mau menikah, dan juga dalam rangka menyelamatkan kita dari jalan kerusakan akibat perzinahan.

Dalam hadits yang lain juga disebutkan:

وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُونَ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ نَهْيًا شَدِيدًا، فَيَقُولُ: {تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ.⁷⁹

Artinya : Dari masih dari Anas bib Malik r.a ia berkata, “Rasulullah SAW. menyuruh kami untuk menikah dan melarang kami dengan keras untuk membujang, beliau bersabda.”Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku bangga dihadapan para Nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat.”(HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Al-Tabattul artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah SWT. *al-Walud* yaitu wanita yang subur peranakannya. Hal ini bisa dilihat dari kerabatnya. *Al-Walud* adalah wanita yang penyayang, sifat baik, berakhlak baik dan setia kepada suaminya.⁸⁰

C. Hukum Menikah

Ibnu Rusyd menuliskan hukum menikah dalam kitabnya *Bidayatul*

Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yaitu:

1. Sekelompok ulama, yaitu jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnah.

⁷⁸ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, h. 317

⁷⁹ Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, h. 222

⁸⁰ Imam Ash-Shan'ani, *Op.cit*, h. 602

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ahli zhahir berpendapat bahwa nikah itu wajib.
3. Para ulama *muta'akhkhirin* (belakangan) dari mazhab Maliki berpendapat bahwa menikah itu bagi sebahagian orang itu wajib, bagi sebahagian orang itu sunnah, dan bagi sebahagian yang lain itu mubah. Hal tersebut berdasarkan kekhawatiran terhadap perbuatan zina atas dirinya.⁸¹

Sebab perbedaan pendapat karena perbedaan pendapat dalam memahami perintah Allah SWT. dalam surah an-Nisaa' [4]:3. Dan juga sabda Nabi SAW.⁸² tentang perintah menikah agar ia bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Adapun ulama yang mengatakan bahwa nikah itu wajib untuk sebahagian orang dan sunnah juga bagi sebagian orang, dan juga makruh bagi sebahagian orang, maka mereka melihat kepada kemashlahatannya.⁸³

Syeikh Wahbah al-Zuhaili menuliskan hukum menikah dalam kitabnya, bahwasanya hukum menikah itu beragam, yaitu tergantung kepada keadaannya masing-masing:

1. Wajib: menurut kebanyakan ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada isterinya baik itu mahar ataupun nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya.

⁸¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jordan: Baitul al-Afkar al-Dauliyah, 2009), h.528

⁸² Hadits sudah dituliskan di pembahasan dalil-dalil hadits tentang syariat menikah.

⁸³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ia juga tidak mampu untuk menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dalam perbuatan zina dengan cara berpuasa.

2. Haram: nikah itu diharamkan jika seseorang yakin akan mendzolimi dan membahayakan isterinya jika menikahinya, seperti tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.
3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak memberikan nafkah, berbuat jelek kepada keluarga. Dalam mazhab Hanafi, makruh ada dua macam; makruh *tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzihi* (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya.⁸⁴

Dalam kondisi tertentu juga seseorang dimakruhkan untuk menikah, seperti ketika seseorang tidak butuh kepada wanita dalam hal jima' dan juga tidak punya biaya. Atau juga ketika ada biaya cukup untuk menafkahi keluarga, akan tetapi ia memiliki penyakit sehingga menghalanginya untuk memiliki keturunan, impoten, maka hukumnya makruh. Demikian pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah.⁸⁵

4. Dianjurkan: menurut jumhur ulama selain Syafi'i, pernikahan dianjurkan ketika seseorang berada dalam keadaan stabil, sekiranya ia tidak terjerumus ke dalam perzinahan jika ia tidak menikah dan juga tidak

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 31

⁸⁵ Ahmad Zarkasih, *Nikah, Sebaiknya Kapan?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. 1, h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khawatir akan mendzalimi isterinya jika ia menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.⁸⁶

D. Syarat dan Rukun Nikah

a. Syarat Nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:⁸⁷

1) Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a.) Bukan mahram dari calon isteri
- b.) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c.) Tidak sedang ihram haji

2) Calon Isteri

Seorang calon isteri yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 32

⁸⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram haji

4) Ijab Kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

5) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Didalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”
Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

b. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam pernikahan, Jumhur Ulama sepakat ada empat, yaitu:⁸⁸

1) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan pernikahan

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama islam.

⁸⁸ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya.
 - c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininnya.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
 - a. Orang merdeka (bukan budak)
 - b. Laki-laki
 - c. Telah dewasa dan berakal sehat
 - d. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah
 - e. Adil
 - f. Berfikiran baik
 - g. Seorang muslim
- 3) Adanya dua orang saksi
 - a. saksi berjumlah minimal dua orang
 - b. kedua saksi itu merdeka (bukan budak)
 - c. saksi bersifat adil
 - d. saksi harus beragama Islam
 - e. saksi harus bisa mendengar dan melihat
 - f. kedua saksi adalah laki-laki
- 4) Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul
 - a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan Kabul

- b. Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas.
- c. Ijab dan Kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat

E. Tujuan Pernikahan

Diantara tujuan dan manfaat pernikahan adalah bahwa pernikahan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan mendapat kasih sayang suami isteri. Manfaat lainnya yaitu mengembangkan keturunan, menjalin ikatan kekeluargaan dan memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.⁸⁹

Dalam konteks Maqashid, al-Jurjawi (w. 1380 H) memandang bahwa pernikahan harus membawa mashlahat, baik bagi suami ataupun isteri, maupun masyarakat. Begitu bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*mashlahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar dari pada keburukan-keburukannya (*mudharat*).

Dari sisi kolektif bisa dipahami bahwa manfaat nikah yang paling berarti menurut al-Jurjawi adalah meneruskan keturunan, tetapi maksudnya bukan hanya pemeliharaan anak secara fisik saja. Lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan menjadi suci dan

⁸⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertib.⁹⁰ Jika kita lihat secara umum, maka tujuan pernikahan sangatlah banyak sekali, di antaranya:

1. Sebagai pemenuhan kebutuhan biologis

Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran hsrat seksual adalah pernikahan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu al-Jurjawi (w. 1380) menyatakan bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.⁹¹

Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, dan Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan seks melalui pernikahan. Quraish Shihab mengatakan bahwa seks bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi sesuatu yang bersih. Allah memerintahkan kita untuk menyalurkan kebutuhan seks ini melalui jalan yang halal, sebagaimana firman Allah SWT.:

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿١٨٧﴾

Artinya : Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. (QS. Al-Baqarah [2]:187)

⁹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Op.cit.*, h. 291, lihat juga Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. II, h. 5

⁹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya : *Datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah [2]:223)*

Quraish Shihab menafsirkan ayat 187 dengan mengatakan bahwa seks merupakan kebutuhan pria dan wanita. Karena itu, mereka para isteri adalah pakaian bagi kamu wahai suami dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalau dalam kehidupan normal seseorang tidak dapat hidup tanpa pakaian, maka demikian juga berpasangan tidak dapat dihindari dalam kehidupan normal manusia dewasa.⁹²

Quraish Shihab memperkuat ayat 178 dengan ayat 223, ia menjelaskan bahwa isteri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat cocok tanam tersebut. Datangi saja dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah yang tepat, bukan arah yang lain. Karena arah yang lain merupakan tempat untuk mengeluarkan najis dan kotoran, bukan menerima yang suci dan bersih.⁹³

Secara dzahir ayat ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. kepada manusia. Ayat ini mengandung ajaran bahwa penciptaan manusia berpasang-pasangan yang kemudian

⁹² Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 1, h. 410

⁹³ *Ibid*, h. 481

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbentuklah suatu keluarga. Suami mendapat ketenangan dari isteri dan juga sebaliknya.⁹⁴

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya, laki-laki tertarik dengan wanita dan juga sebaliknya, ini merupakan sebuah fitrah manusia. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang selalu cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya, bahkan Islam melarang seseorang untuk membujang (*tabattul*).⁹⁵

2. Menggapai kedamaian dan ketentraman

Kedamaian, ketentraman, ketenangan hidup, rasa cinta merupakan keinginan setiap manusia, ia diibaratkan seperti air yang setiap saat, dimanapun dan kapanpun pasti dibutuhkan dan diinginkan oleh semua orang. Di samping sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, pernikahan juga sebagai bukti kebesaran Allah yang didalamnya banyak perenungan dan nilai-nilai kehidupan. Adapun tujuan pernikahan yang lain sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Ar-Ruum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

⁹⁴ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 1, h. 238

⁹⁵ Arisman, *Op.cit*, h. 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan kita dalam pernikahan tentunya menjadikan keluarga kita sebagai bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*. Karena sebuah keluarga yang tidak tercapai tiga unsur tersebut, pastilah tujuan dari pernikahan itu sendiri akan sulit dicapai.

Sakinah bermakna bahwa pernikahan melahirkan ketenangan batin. Allah telah menciptakan dalam setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya. Dari sini Allah SWT. menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Maka dari itu, setiap manusia merasa perlu untuk menemukan lawan jenisnya, karena semakin hari kebutuhan akan lawan jenis ini semakin memuncak. Ia akan gelisah, pikiran akan kacau, jiwa akan terus menerus bergejolak jika kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bagi manusia, agar semua kegelisahan itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.⁹⁶ Quraish Shihab menyebutkan bahwa *sakinah* di ambil dari kata *sakana* berarti diam/tenangnya sesuatu. Pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang disembelih tenang, tidak bergerak. *Sakinah* dalam pernikahan, yaitu ketenangan dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.⁹⁷

Mawaddah mengandung arti cinta dan harapan, al-Biqā'i mengatakan kelapangan dan kekosongan. Ia merupakan rasa cinta yang tampak buahnya dari sikap dan perlakuan.⁹⁸ Imam Qurthubi dalam

⁹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 11, h. 35

⁹⁷ Arisman, *Op.cit*, h. 63, lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996), h. 225

⁹⁸ Quraish Shihab, *Loc.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan makna *mawaddah* ia menukil pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid, yaitu *mawaddah* berarti hubungan seksual dan *rahmah* adalah anak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksud *mawaddah* dan *rahmah* adalah kasih sayang hati mereka satu sama lain. Sedangkan As-Sudi berkata bahwa *mawaddah* adalah cinta dan *rahmah* adalah rasa sayang.

Pendapat yang lain dari Ibnu Abbas tentang makna *mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki kepada isterinya dan *rahmah* adalah kasih sayangnya kepada isterinya bila dia terkena sesuatu yang buruk.⁹⁹ Buya Hamka mendefinisikan *rahmah* dengan arti kasih sayang, kasih sayang yang lebih dalam dari pada cinta.¹⁰⁰

Al-Jurjawi (w. 1380) menjelaskan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada suami isteri. Kemesraan suami isteri dipandang sebagai media bagi perkembangan jiwa. Hubungan seksual dan kemesraan itu sangat berpengaruh dalam berkembangnya pasangan suami sitri dan juga meringankan beban psikis.¹⁰¹

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah menciptakan perempuan untuk kaum laki-laki dari jenis yang sama, menjadikan awal permulaan kejadian dan penciptaan perempuan dari tubuh laki-laki. Hal itu

⁹⁹ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. 2, h. 40

¹⁰⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) Cet. 1, Jil. 7, h. 51

¹⁰¹ Arisman, *Op.cit*, h. 292

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan agar supaya bisa tercipta keharmonisan, kecocokan, kenyamanan, dan kekeluargaan.¹⁰²

Allah juga berfirman dalam surah an-Nisaa' [4] ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: *Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Imam Syafi'i berkata, "Allah berfirman, (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

'Bergaullah dengan mereka secara patut.' Ini adalah ayat yang kami sajikan mengenai hak isteri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut masalah sandang pangannya. Juga hak suami yang harus ditunaikan oleh sang isteri yang tidak termasuk hak isteri yang harus ditunaikan oleh sang suami dan hak kewajiban mereka satu sama lain.¹⁰³

3. Menjaga kehormatan diri, anak, dan keluarga

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina.¹⁰⁴

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2016), Cet. 1, h. 92

¹⁰³ Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Penerjemah: Fuad S.N, Ghafur, (Jakarta: Almahira, 2008), Cet. 1, Jil. 2, h. 73

¹⁰⁴ Ahmad al-Mursi Husin Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, Penerjemah: Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. 4, h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan akad yang suci untuk mengemban misi yang suci pula, karena itu syariat Islam mengatur kehidupan manusia khususnya masalah keluarga agar tetap berada dalam kesucian itu.

Allah SWT. berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ آتَبَعِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mu'minun [23]: 5-7)

Dalam ayat yang lain Allah SWT. juga berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ آتَبَعِي وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Ma'arij [70]: 29-31)

Menurut Quraish Shihab, orang yang termasuk memperoleh kebaikan yaitu mereka yang tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama. Menyalurkan kebutuhan biologis kepada pasangan hidup pun diatur oleh agama, seperti tidak boleh bercampur dengan isteri jika ia sedang haid, atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 14, h. 410

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu larangan dalam menyalurkan kebutuhan biologis yaitu mencampuri isterinya melalui dubur. Diharamkan menyetubuhi isteri pada duburnya berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah serta *atsar* para sahabat dan pendapat-pendapat ahli ilmu yang *mu'tabar* dari kalangan salaf maupun *khalaf*.¹⁰⁶

Kemudian dalam hadits juga Rasulullah SAW. dengan jelas mengatakan keharaman menggauli isteri pada duburnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا. (رواه أحمد وأبو داود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda. "Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi isteri pada duburnya." (HR. Ahmad dan Abu Daud)*¹⁰⁷

Hadits di atas menunjukkan haramnya menggauli wanita pada dubur. Demikian pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hal itu merusak keagamaan dan keduniaan.¹⁰⁸ Maka dengan pernikahan, seseorang akan mendatangi isterinya dari tempat yang diatur agama, sehingga ia tersekatkan dari laknat Allah SWT. karena mendatangi isterinya pada tempat yang salah.

Dalam tafsir al-Azhar, buya Hamka menjelaskan kata *faraj* yang diartikan dengan alat kelamin atau kemaluan, biasanya juga diartikan

¹⁰⁶ Amru Abdul Mun'in Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (tt: Daar An-Naba', 2010), Cet. 4, h. 140

¹⁰⁷ Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, Jil. 3, h. 529

¹⁰⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kehormatan. Yang lebih tepat yaitu mencakup kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam ayat ini disebut bahwa salah satu ciri orang yang beriman ialah yang menjaga dan tidak mempergunakan alat kelaminnya dengan salah atau tidak menjaga dan memeliharanya. Dan semua itu bisa dilakukan melalui jalan pernikahan.¹⁰⁹

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya.¹¹⁰

Disyariatkannya pernikahan adalah salah satu sarana Islam mewujudkan kemashlahatan kehidupan manusia dan menolak kemudharatan yang ditimbulkannya. Dikatakan demikian karena dengan adanya pernikahan seseorang akan terhindar dari hubungan seksual secara bebas yang mendatangkan banyak mafsadat seperti penyakit menular HIVAids dan sejenisnya. Pernikahan juga dapat memelihara diri dan

¹⁰⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) , Cet. 1, Jil. 9, h. 314

¹¹⁰ HAS Al-Hamdani, *Risah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 133

mencegah dari perbuatan asusila dan menjaga kehormatan diri dan keluarga.¹¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹¹ Johar Arifin, *Pemikiran Maqashid M. Quraish Shihab (Studi Atas Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al-Misbah)*, Disertasi (Pekanbaru: Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2018), h. 283

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Melihat dari apa yang telah dijelaskan dalam tulisan ini dari awal sampai pada poin ini, maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (2) tentang kewajiban Isteri yang berbunyi : “isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya”. Artinya, pada prinsipnya, para imam mazhab yang empat (Abu Hnafiah, Maliki, Syafi’I dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa suami tidak boleh memaksa isteri untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, karena hakikat dari akad nikah adalah untuk saling bersenang-senang (*istimta’*), bukan untuk pelayanan (*istikhdam*) serta di ambil manfaatnya. Dan ulama-ulama lain juga mengatakan hadist-hadist yang menceritakan khidmat seorang isteri terhadap suaminya itu merupakan perbuatan suka rela dan akhlak mulia.
2. Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa antara hak seorang isteri harus seimbang dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ia lakukan. Ditetapkan bahwa isteri mempunyai beberapa kewajiban yang secara eksplisit tergambar dari nash. Di antaranya yaitu kewajiban untuk melayani suami dalam hal hubungan biologis, kewajiban untuk menjaga harta kehormatan selaku isteri, serta kewajiban untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami, adapun tugas menyapu, mengepel, memasak dan sebagainya adalah termasuk pengabdian isteri kepada suaminya bukan bentuk kewajiban

isteri kepada suaminya. Ditentukan juga bahwa suami berhak untuk menuntut hak-haknya yang merupakan kewajiban isteri, dan suami dilarang untuk menuntut sesuatu yang bukan haknya, termasuk, menuntut isteri untuk berkhidmat kepadanya.

B. Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Dalam hubungan suami isteri, seharusnya masing-masing memahami kewajiban kewajiban yang mesti dilakukan, karena pemenuhan kewajiban tersebut erat kaitannya dengan hak-hak yang diperoleh. Khusus untuk kepada suami hendaknya tidak memaksa isterinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah.
2. Dalam hubungan rumah tangga, hendaknya suami isteri saling memahami kondisi masing-masing mereka, saling membantu, berkomunikasi dengan baik, sehingga permasalahan kehidupan rumah tangga dapat diselesaikan dengan bijak. Di samping itu, para suami harus memperhatikan batasan-batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang isteri tidak bersembarangan dengan konsep nilai yang terdapat dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2,
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin 'Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2019), Cet. 17
- Ahmad al-Mursi Husin Jauhar, *Maqasid Syari'ah*, Penerjemah: Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. 4
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001)
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz. II
- Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. 2
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke- 2
- Amru Abdul Mun'in Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (tt: Daar An-Naba', 2010), Cet. 4
- Asni, *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah KHI Perspektif Kesetaraan Gender)*, Jurnal Perempuan,
- Azzaini Jamil, *A Tribute To Others Empowering Leadership*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2016), Cet. 2
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. 3
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),
- Hamidah Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), Cet.1
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) , Cet. 1, Jil. 9
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015) Cet. 1, Jil. 7
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 1, Jil. 7
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiah, 2002), Cet. 1
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, (Daar al-Thoybah, 2005), Cet. 1, Jil. 11
- Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fath al-Baarii bi al-Syarhi al-Shahih al-Bukhari*, (Daar al-Thoybah, 2005), Cet. 1, Jil. 11,
- Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Ahmad Rijal Kadir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Cet. 2, Jil.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Penerjemah: Fathurrahman dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009),Cet. 2
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* (Jordan: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), Cet. 2
- Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, Jil. 3
- Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Abdul Hayyi, (Jakarta: Gema Insani, 2017), Jil. 2
- Islamiyati, Jurnal, *Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang,
- Johar Arifin, *Pemikiran Maqashid M. Quraish Shihab (Studi Atas Ayat-Ayat Hukum Keluarga Dalam Tafsir Al-Misbah)*, Disertasi (Pekanbaru: Pasca Sarjana UIN Suska Riau, 2018)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1996)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 1
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Didunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhanif Ali, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Musa bin Ahmad al-Hajawi, *Al-Iqna' li al-Thalib al-Intifaq*, (Riyadh: Dar al-Malik Abdul Aziz, 2002), Cet. 3, Juz. 3
- Prasetyo Bambang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 9
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 11
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Cet. 1, Jil.2
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2013)
- Retnowulandari Wahyuni, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Sebuah Kajian UU Perkawinan dan KHI*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), Cet. 1
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), Cet. 1
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Jordan: Baitul al-Afkar al-Dauliyah, 2009)
- Sarwat Ahmad, *Isteri Bukan Pembantu*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), Cet. 1,
- Siti Musdah Mulia, *Kompilasi Hukum Islam Sangat Konservatif*, dalam islamlib.com/kajian/fikih/siti-musdah-mulia-kompilasi-hukum-islam-sangat-konservatif/. Diakses pada 14 September 2020, Pukul 10.00 WIB.
- Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, Penerjemah: Fuad S.N, Ghafur, (Jakarta: Almahira, 2008), Cet. 1, Jil. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaron Brigette Lantaeda, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 048,

Syeikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Abu Abdirrahman, (Surabaya: Pustaka Elba, 2016), Cet. 1

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. 2

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. 2, Jil. 7

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. 1, Jil. 2

Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Khattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2016), Cet. 1

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damasqus: Dar al-Fikri, 1975), Cet. 2, Jil. 7

Wijaratul al-Auqat wa asy-Sya'un al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Thaba'ah Dzati as-Salaasil, 1990), Cet. 2, Juz. 19

Zakiyah Drajat dkk, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), Jil. II

Zarkasih Ahmad, *Nikah, Sebaiknya Kapan?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), Cet. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2”**, yang ditulis oleh:

Nama : **LIDYA TIARA BATUBARA**
 NIM : **11721202866**
 Program Studi : **S1 Hukum Keluarga**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

Sekretaris
Mutasir, S.Hi., M.Sy.

Penguji I
Haswir, M.Ag.

Penguji II
Dr. M. Ihsan, M.Ag.

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalimus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : LIDYA TIARA BATUBARA
NIM : 11721202866
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : ANALISIS TERHADAP PERAN ISTERI MENYELENGGARAKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA DALAM KHI PASAL 83 AYAT 2

Pembimbing: Yuni Harlina, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



LIDYA TIARA BATUBARA, lahir di Aek Bange pada tanggal 04 September 1999 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayahanda Muhammad Taher Batubara dan Ibunda Sri Wati. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak Kanak di TK Darul Iman Aek Bange. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 013825 Aek Bange kemudian lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Pesantren Arkanuddin Pulo Dogom tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Pendidikan Kader Ulama Daar Al Ulum Asahan-Kisaran pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur UM-PTKIN. Selama menempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi, diantaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA).

Penulis juga telah melaksanakan Magang/PKL di Pengadilan Agama Padang Sumatera Barat pada Juli – Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Juli – Agustus 2020 di Desa Aek Bange Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Penulis melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam KHI Pasal 83 Ayat 2*”, dibawah bimbingan Ibu Yuni Harlina, M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 22 April 2021- 10 Ramadhan 1442H, Alhamdulillah Penulis dinyatakan **LULUS** dengan IPK 3.51 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) .